

**URGENSI PERLINDUNGAN *HUKUM INTERNALLY DISPLACED PERSON (IDP)*  
PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA DI NIGERIA PADA TAHUN 2009  
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Rensy Triana Putri B, Nurdin, SH.,MHum, Ikaningtyas, SH.,LLM

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

Email: [rensytriana@yahoo.com](mailto:rensytriana@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Konflik bersenjata pada dewasa ini masih terjadi di beberapa bagian-bagian negara di dunia. Konflik bersenjata yang terjadi tersebut menimbulkan beberapa dampak-dampak negative, khususnya bagi para pihak yang tidak terlibat di dalam konflik bersenjata tersebut. Dampak yang negative tersebut menimbulkan pilihan bagi pihak yang tidak ikut terlibat untuk melakukan pergerakan atau perpindahan tempat tinggal yang disebut dengan mengungsi di tempat atau wilayah yang lainnya yang lebih aman yang masih berada di dalam batas wilayah negara. Hal tersebut merupakan bentuk ancaman terhadap perlindungan kehidupan, keamanan dan kesejahteraan manusia untuk hidup, berdasarkan hal itu maka diperlukan perlindungan hukum dalam perspektif Hukum Internasional.

Kata Kunci : Konflik Bersenjata, Pengungsi, *Internally Displaced Person (IDP)*,

**ABSTRACT**

*Armed conflict nowadays is still happen in some state region in the world. Armed conflict that happened is create some negative implication, especially for those party who not get involved on the armed conflict. The negative implication, raise a choice for those party who not get involved to moving or fleeing to another place that more safe and still in the territory border of state. That implication is a structure of threat to life protection, security, and welfare to live, based on that reason therefore protection of law by International Law is necessary.*

*Keywords: Armed conflict, Refugee, Internally Displaced Person (IDP).*

## I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai suatu individu maupun sebagai suatu kelompok juga mempunyai suatu kebiasaan untuk hidup berpindah-pindah. Mobilitas manusia begitu tinggi dewasa ini untuk mendapatkan penghidupan yang layak baginya. Hidup yang berpindah-pindah tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor-faktor penting, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik yang menyebabkan manusia sebagai individu maupun manusia secara berkelompok berpindah tempat. Hal perpindahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa perubahan sosial di lingkungan habitatnya. Perubahan sosial yang mempengaruhi tersebut dapat berupa perubahan sosial dari faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Faktor dari dalam yaitu adanya pemberontakan, pertentangan masyarakat atau revolusi, faktor dari luar yaitu lingkungan fisik, peperangan dan perubahan lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Faktor keamanan tersebut terjadi karena suatu ancaman keamanan terhadap dirinya, hak asasi yang dimiliki maupun karena ancaman untuk kesejahteraannya yang bersifat berkepanjangan. Dengan adanya keinginan dan hak untuk mendapatkan keamanan dan kebebasan tersebut juga dijamin di dalam Hak Asasi Manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM 1948 menjamin akan setiap individu untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan bagi dirinya sendiri. Berpindahnya manusia atau suatu kelompok manusia yang disebut dengan pengungsi, telah ditempatkan menjadi suatu masalah kemanusiaan global yang dapat terjadi dimanapun. Sebagaimana dengan masalah kemanusiaan lainnya maka isu global tentang pengungsi tersebut telah mendapat suatu penegasan dan pelebagaan dalam instrument hukum Internasional.<sup>2</sup> Nigeria sebagai salah satu negara di Afrika Barat, saat ini telah mengalami suatu pergolakan di dalam negerinya, yang diakibatkan oleh adanya militan agama tertentu yang bersenjata yang mencoba untuk memberontak terhadap pemerintahan Nigeria. Pada dasarnya

---

<sup>1</sup>Kun Maryati, Juju Suryawati, **Sosiologi Jilid 3**, Erlangga, Jakarta, 2012, hal 26

<sup>2</sup>Wagiman, **Hukum Pengungsi Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 52

apa yang dilakukan oleh kelompok militant tersebut dengan memberontak, adalah semata-mata untuk memaksakan suatu ideology tertentu ke dalam pemerintahan Nigeria tersebut, tetapi pemerintah Nigeria menyatakan penolakan terhadap ideology tersebut yang hanya mementingkan kaum mayoritas semata.

Kejadian tersebut merupakan salah satu kejadian yang menimbulkan jumlah perpindahan kelompok manusia yang besar bagi komunitas global dan pemerintah Nigeria. Orang-orang tersebut berpindah karena adanya situasi dalam negara yang tidak memungkinkan untuk ditinggali dan tidak adanya keamanan bagi mereka para penduduk sipil. Situasi di Nigeria pada kasus diatas menjasi satu-satunya faktor bagi para penduduk sipil di Nigeria untuk melakukan perpindahan tempat tinggal atau mengungsi. Kelompok pengungsi diklasifikasi menurut tempat dimana orang-orang tersebut bermigrasi. Dua klasifikasi tersebut adalah *pertama*, imigrasi Internasional yaitu perpindahan penduduk yang melewati batas negara dan yang *kedua*, adalah migrasi intern yaitu migrasi yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara tertentu.<sup>3</sup>

Di dalam dunia global saat ini banyak fokus terdapat pada pengungsi Internasional yang semakin banyak jumlahnya, sedangkan pengungsi internal juga tidak sedikit. Hal tersebut terlihat pada kasus diatas mengenai adanya pertambahan jumlah pengungsi internal akibat adanya kejadian pemberontakan militant-militan Boko Haram di Nigeria, serta pengungsi-pengungsi Internal di tempat-tempat tertentu. Berdasarkan kasus tersebut maka perlu diadakannya suatu penelitian mengenai suatu perlindungan hukum terhadap pengungsi internal. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk mengkaji masalah yang krusial dan merupakan isu global bagi masyarakat internasional, tentang **Urgensi Perlindungan Hukum *Internally Displaced Person* (IDP) Pada Saat Konflik Bersenjata di Nigeria Pada Tahun 2009 Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional.**

---

<sup>3</sup>Wagiman, *Opcit* , hal 57

## II. RUMUSAN MASALAH

1. Apa urgensi perlindungan hukum terhadap *Internally Displaced Person* (IDP) terkait dengan konflik bersenjata di Nigeria?
2. Bagaimana perlindungan terhadap pengungsi dengan klasifikasi *Internally Displaced Person* (IDP) berdasarkan hukum internasional terkait dengan konflik bersenjata di Nigeria?

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis normatif, yaitu menganalisis dan mengkaji kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>4</sup> Khususnya hukum internasional yang berhubungan dengan pengungsi. Norma dan kaidah hukum tersebut nantinya akan dijadikan acuan dalam memberikan kajian terkait dengan kasus. Dimana lebih lanjut akan dianalisis dan dikaji mengenai perlindungan salah satu bentuk status dari pengungsi, yaitu pengungsi dengan status *Internally Displaced Person* (IDP) atau pengungsi internal yang ada di dalam kaedah-kaedah hukum internasional khusus tentang pengungsi.

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah digunakan pendekatan *Statutes Approach*, *Case Approach*, dan *Conceptual Approach*. Oleh sebab itu sumber bahan hukum yang akan digunakan adalah berupa sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa:

1. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948

---

<sup>4</sup>Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal 36

2. *Geneva Convention (IV) relative to Protection of Civilian Persons in Time of War* 1949.
3. *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966.
4. *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) 1966
5. *Guiding Principles on Internal Displacement*
6. *African Union Convention for The Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention)* 1998.

Bahan hukum sekunder adalah berupa tulisan atau karya ilmiah dan hasil report atau data yang berhubungan dengan Internally Displaced Person (IDP), dan bahan hukum tersier berupa data-data survey, dan kamus-kamus yang mendukung penelitian ini.

Teknik analisis sumber bahan hukum akan digunakan teknik analisis *deskriptif-kualitatif*, yaitu sumber bahan hukum yang telah didapat oleh penulis selanjutnya dilakukan analisis dengan cara berikut; *pertama*, mendeskripsikan kejadian berdasarkan kasus yang dianalisis. *Kedua*, melakukan analisa mendalam terkait pengaturan dan perlindungan bagi para pengungsi dengan status pengungsi sebagai IDP dalam kasus pemberontakan militant Boko Haram di Nigeria. *Ketiga*, melakukan analisis kembali untuk mengetahui berbagai konsep-konsep atau prinsip-prinsip di dalam hukum internasional terkait topik kasus yang dibahas. *Keempat*, melakukan penafsiran terhadap seluruh bahan hukum yang telah diperoleh. *Kelima*, melakukan analisis keseluruhan secara kualitatif terhadap kasus tersebut.

#### IV. HASIL dan PEMBAHASAN

##### A. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap *Internally Displaced Person* (IDP) Terkait dengan Konflik Bersenjata di Nigeria

Manusia sebagai suatu makhluk sosial dan sebagai seorang individu mempunyai suatu naluri alami untuk hidup berpindah-pindah tempat. Suatu kegiatan atau aktivitas alamiah tersebut telah terjadi sejak jaman purba dahulu kala, dimana suatu spesies *homo sapiens* dikenal hidup secara *nomaden* atau berpindah-pindah tempat tinggal. Pada jaman globalisasi saat ini hal tersebut semakin dianggap wajar, karena suatu perpindahan penduduk dari suatu tempat tinggal menuju tempat lainnya adalah dikarenakan berbagai faktor. Faktor-faktor perpindahan suatu kelompok masyarakat dikarenakan oleh beberapa faktor, menurut Lee (1983 dalam Mulyadi, 2003: 128) faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor-faktor pendorong suatu manusia meninggalkan tempat asalnya (*push factor*);
2. Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan, yaitu faktor-faktor yang menjadi daya tarik suatu perpindahan;
3. Faktor yang menjadi halangan suatu perpindahan (*intervining obstacles*);
4. Faktor pribadi atau pelaku individu tersebut sendiri.

Faktor-faktor diatas tersebut merupakan suatu faktor-faktor yang secara umum mempengaruhi seseorang atau suatu kelompok masyarakat tertentu untuk berpindah. Dimana faktor-faktor tersebutlah yang mendasari seseorang dalam mengambil suatu keputusan atau tinggal berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Secara khusus, juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu perpindahan individu atau kelompok masyarakat, dengan status yang lebih khusus yaitu pengungsi domestik atau *Internally Displaced Persons* (IDP) dalam hukum internasional. Faktor-faktor tersebut adalah<sup>5</sup> :

1. Peristiwa alam atau *natural disaster*, dan

---

<sup>5</sup> Irawati Handayani, 2002, **Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik (Internally Displaced Persons) Dalam Sengketa Bersenjata Internal Menurut Hukum Internasional**, Bandung : Jurnal HI UNPAD , vol. 1 no.2 , hal 158

2. Peristiwa sebagai suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau *human made disaster*.

*Natural disaster* adalah suatu kejadian berbahaya yang timbul yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kekacauan dan korban jiwa, dan meninggalkan suatu akibat tidak dapatnya suatu aktivitas berjalan dengan normal tanpa adanya suatu perbaikan (Twig, 2007).<sup>6</sup>Bentuk-bentuk bencana alam berbagai macam, beberapa bentuk bencana alam yaitu tsunami, banjir bandang, gempa bumi, erosi, dan bentuk-bentuk bencana yang berasal dari alam. Contoh-contoh tersebut juga ditegaskan di dalam US *Legislation* tahun 1990 yang mengatakan bahwa *natural disaster* adalah yang termasuk “*an earthquake, flood, epidemic, or other environmental disaster in the State resulting in a substantial, but temporary, disruption of living conditions in the area affected*”.<sup>7</sup>

*Natural disaster* tersebut diatas menimbulkan akibat yang dikenal dengan sebutan *natural disaster impact*. *Natural disaster impact* dapat didefinisikan sebagai hal yang berupa langsung, maupun tidak langsung serta kehilangan yang tidak berwujud dengan jelas pada lingkungan hidup dan di dalam suatu kelompok masyarakat karena bencana alam (Swiss Re, 1998).<sup>8</sup>Pada dasarnya akibat daripada *natural disaster* ini dapat mengakibatkan berbagai macam akibat, yaitu banyaknya korban jiwa dan tentu saja banyaknya suatu kelompok masyarakat atau individu yang berpindah tempat untuk menghindari berbagai *natural disaster* susulan lainnya serta akibatnya. Perpindahan seseorang yang terkena suatu bencana alam pada umumnya hanya sekedar berpindah tanpa melewati batas negara, yang disebut dengan status *Internally Displaced Person* (IDP). The United Nations and the Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) menemukan bahwa pada saat ini masih tidak dapat diprediksi dengan pasti apakah nantinya seseorang dengan status

---

<sup>6</sup> John Tiefenbacher (Ed), *Approches to Managing Disaster – Assesing Hazards, Emergencies and Disaster Impact*, Croatia, InTech Europe, 2012, page 109

<sup>7</sup>S. Martin, „Managing Environmentally-Induced Migration”, in F. Laczko and C. Aghazarm (eds.), *Migration, Environment and Climate Change* 353, 2009, note 6 dalam Roberta Cohen, Megan Bradley, *Disasters and Displacement : Gaps in Protection*, Journal of International Humanitarian Legal Studies, Vol. 1, 2010, page 12

<sup>8</sup> John Tiefenbacher (Ed), *ibid*, page 109

“*displaced*” tersebut akan menetap secara sementara atau bahkan enggan untuk kembali ke tempat asalnya, pada tahun 2008 sejumlah 36 juta orang berpindah dikarenakan suatu bencana yang secara tiba-tiba, serta juga terdapat 20 juta “*displaced*” berpindah dikarenakan bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim.<sup>9</sup>

Man made disaster atau yang disebut dengan suatu bencana yang dibuat oleh manusia didefinisikan sebagai bencana inkubasi di dalam terminology yang tidak sesuai diantara negara yang memburuk tetapi tidak terstruktur secara peristiwa dan secara kebudayaan : atau lebih spesifik norma kebudayaan, asumsi, dan kepercayaan yang dianut oleh sebuah organisasi atau industry untuk berhubungan dengan hal yang membahayakan, dan mengancam.<sup>10</sup> Macam-macam bentuk *man-made disaster* adalah sebagai contoh yaitu seperti terorisme, pemberontakan, konflik masyarakat, dan perang. Bahwa hingga dewasa ini berbagai contoh *man-made disaster* tersebut masih berkembang dan timbul tiada henti serta semakin menambah jumlah korban yang terlibat di dalamnya. *Man-made disaster* juga dapat dikategorikan menjadi dua sebab secara garis besar, yaitu :<sup>11</sup>

1) *economic crises including growth collapse, hyperinflation, financial, and currency crises;*

2) *violence such as terrorism, civil strifes, riots, and wars.*

Konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk bencana yang dibuat oleh manusia, atau disebut dengan *man-made disaster* sebagai suatu pengaruh atau pendorong perpindahan seseorang ataupun suatu kelompok masyarakat. Khususnya konflik bersenjata menyebabkan banyaknya jumlah *Internally Displaced Person*

---

<sup>9</sup>UN OCHA and IDMC, „Monitoring Disaster Displacement in the Context of Climate Change“, 22 September 2009, at 9. For an analysis of the connection between climate change and displacement, see V. Kolmannskog, „Climate Change, Disaster, Displacement and Migration: Initial Evidence from Africa“, UNHCR Working Paper 181 (2009), at 6, 10; also Norwegian Refugee Council, „Climate Changed: People Displaced“, 8 December 2009, (last accessed 17 February 2010).

<sup>10</sup> N. Pidgeon, M. O’ Leary, *Man-made disaster : why technology and organizations (sometimes) fail*, Safety Science, 2000, page 18

<sup>11</sup>Sawada Yasuyuki, Rima Bhattacharyay, Kotera Tomoaki, *Aggregate Impact of Natural and Man-made Disasters: A quantitative comparison*, RIETI Discussion Paper Series E- 023, The Research Institute of Economy, Trade and Industrie, 2011, page 3-4



(IDP) bertumbuh di dunia, seiring dengan banyaknya konflik bersenjata yang muncul. Selain pada kenyataannya bahwa, konflik bersenjata juga mempengaruhi berbagai aspek lain di suatu wilayah tempat terjadinya konflik, terutama pengaruh terhadap lingkungan sosial tempat tinggal. Konflik bersenjata dapat didefinisikan sebagai suatu konflik yang terjadi antara dua partai atau pihak yaitu dapat berupa antara kelompok bersenjata dengan angkatan militer, dimana kedua pihak yang berkonflik tersebut terlibat pada suatu konflik yang serius dan berkepanjangan.<sup>12</sup> Definisi tersebut digambarkan pada Geneva Convention 1949 Article 3. Selain itu juga terdapat definisi lainnya, yang didefinisikan di dalam ICC Appeals Chamber untuk konflik bersenjata yaitu “*whenever there is a resort to armed force between states or protracted armed violence between governmental authorities and organised armed groups or between such groups within a state*”.<sup>13</sup>

Dalam kriteria konflik bersenjata ini terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi suatu konflik bersenjata internasional, yaitu:<sup>14</sup>

1. negara dimana terjadi pemberontakan mengakui pihak pemberontak sebagai *belligerents*.
2. satu atau lebih negara asing membantu salah satu angkatan bersenjata pihak yang berkonflik.
3. dua negara sing melakukan intervensi dengan angkatan bersenjata dan membantu masing-masing pihak yang berkonflik.

Sebagai contoh di Timur Tengah dan Afrika Utara, aksi individu atau pengorbanan pemberontakan yang dilakukan oleh seorang Tunisian pada akhir tahun 2010 menimbulkan pergerakan perpindahan yang sangat sering terjadi. Kejadian tersebut menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan oleh angkatan negara, yang pada akhirnya menyebabkan atau menimbulkan pengungsi

---

<sup>12</sup> Eve La Yahe, *War Crimes in Internal Armed Conflict*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, page 8

<sup>13</sup> Burus M. Carnahan, *Lincoln, Lieber and the laws of war: the origins and limits of the principle of military necessity*, The American Journal of International Law, Vol.92, American Society of International Law, 1998, page 214.

<sup>14</sup> Pietro Verri, *Dictionary of the International Armed Conflict*, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1992, page 35.

internal yang sangat besar. Penjelasan diatas tentang konflik bersenjata, maka bencana yang ditimbulkan manusia juga dapat menyebabkan suatu masalah perpindahan yang besar, selain daripada alasan konflik bersenjata. Konflik bersenjata hanya salah satu sebab timbulnya perpindahan yang *massive*.

Konflik bersenjata di Nigeria yang terjadi pada tahun 2009 hingga saat ini telah menyebabkan berbagai dampak negative, baik di dalam wilayah internal negara Nigeria sendiri maupun di dalam lingkungan Internasional. Konflik bersenjata yang terjadi yang terjadi di Nigeria saat ini merupakan suatu konflik bersenjata yang dikategorikan sebagai konflik bersenjata internal, dimana pihaknya adalah sebuah anggota kelompok bersenjata dengan pemerintah.<sup>15</sup> Dalam hal ini kelompok bersenjata tersebut juga dapat disebut dengan *insurgent* atau pemberontak, yang memenuhi kriteria-kriteria bahwa pemberontak tersebut melakukan suatu pelanggaran manifestasi ketika suatu negara tidak dapat dan tidak mempunyai keinginan untuk memenuhi keinginan atau kepentingan daripada kelompok pemberontak tersebut.<sup>16</sup> Dalam situasi ini, pemberontak tersebut atau *insurgent* tersebut membuka suatu intensi untuk berkonflik. Oleh Scott Moore dalam papernya *The Basic of Counterinsurgency* mengatakan bahwa *insurgent* dalam hal ini juga mencari suatu perubahan radikal terhadap eksistensi politik yang ada dan tuntutan sosial melalui penggunaan kekerasan yang berkesinambungan dan gangguan politik.

Di dalam suatu konflik bersenjata dikenal adanya beberapa prinsip yang melindungi penduduk sipil yang tidak turut serta dalam konflik bersenjata. Prinsip tersebut yaitu prinsip *humanity* atau prinsip kemanusiaan. Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.<sup>17</sup> Dalam asas ini dimaksudkan bahwa bagi setiap pihak yang berkonflik tidak diperbolehkan untuk

---

<sup>15</sup> Art 3, Chapter 3, Section 3.8.6 Geneva Convention 1949

<sup>16</sup> FM 3-24, MCWP 3-33.5, *Insurgencies and Countering Insurgencies*, Washington DC, Headquarters Department of The Army, 2014, Chapter 4 (4-2).

<sup>17</sup> Arlina Permanasari, Aji Wibowo, dkk, **Pengantar Hukum Humaniter**, Jakarta, International Committed of the Red Cross, 1999, hal 11.

menimbulkan hal-hal seperti halnya yang dimaksud oleh asaa tersebut, yaitu harus memperhatikan adanya perikemanusiaan yang melindungi setiap pihak yang terlibat maupun yang hanya terkena akibatnya saja atas terjadinya konflik. Lebih lanjut prinsip kemanusiaan ini juga mengindahkan adanya pelanggaran penggunaan metode-metode berperang yang tidak perlu, yang hanya digunakan untuk mencapai suatu kepentingan militer semata.<sup>18</sup>

Menurut Jean Pictet “ *the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operation*”.<sup>19</sup>

Beberapa tindakan pelanggaran dilakukan selama terjadinya konflik bersenjata di Nigeria hingga saat ini oleh satu-satunya kelompok pemberontak bersenjata Boko Haram. Kejadian tersebut melanggar cara-cara konflik bersenjata yang telah ditetapkan secara benar. Beberapa fakta dibawah ini bahwa kelompok militant Boko Haram telah melakukan beberapa pelanggaran dalam konflik bersenjata di Nigeria :

1. Kelompok militan Boko Haram telah merebut kota Chibok di Nigeria timur laut, kampung halaman lebih dari 200 remaja perempuan yang diculik kelompok itu awal tahun ini.<sup>20</sup>
2. Serangan militan islam di Kano, Nigeria Utara, Jumat (20/1) menewaskan sekitar 150 orang.<sup>21</sup>

Fakta tersebut telah melanggar suatu asas pelaksanaan atau *principles of application* yang salah satu dalam prinsip tersebut menyatakan demikian:<sup>22</sup>

1. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perseorangan, tidak boleh dijadikan obyek serangan meskipun dalam suatu hal pembalasan atau *reprisals*.
2. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan terror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.

---

<sup>18</sup> Arlina Permanasari, Aji Wibowo, dkk, *ibid*, hal 51.

<sup>19</sup> Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, Dordrecht, 1985, page 62 dalam Arlina Permanasari, *ibid*, hal 74.

<sup>20</sup> <http://www.voaindonesia.com/content/boko-haramrebut-kota-chibok-kampung-halaman-200-perempuan-yang-diculik/2521230.html> diakses pada tanggal 17 Januari 2015

<sup>21</sup> [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/01/120122\\_nigeriablast.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/01/120122_nigeriablast.shtml) diakses pada tanggal 17 Januari 2015

<sup>22</sup> Jean Pictet, *locit*, page 72-73

3. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau, setidaknya, untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tak disengaja menjadi sekecil mungkin.

Konflik bersenjata yang terjadi di Nigeria sejak 2009 telah mengalami penyebaran wilayah tempat terjadinya konflik. Konflik ini berawal dari sebuah kota bernama Maiduguri di Nigeria, berkembang menuju wilayah-wilayah kota di bagian negara Nigeria lainnya. Beberapa kejadian yang sama terjadi di wilayah-wilayah lainnya yang menjadi obyek sasaran, disertai oleh banyaknya korban jiwa yang terus meningkat hingga saat ini. Perkembangan wilayah serangan tersebut secara langsung akan menimbulkan lebih banyaknya orang-orang yang mengungsi dari suatu wilayah mereka menuju wilayah yang lebih aman. Dengan demikian jumlah perpindahan manusia dengan status sebagai *internal displaced* bertambah.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap *Internally Displaced Person* (IDP)**

### **Berdasarkan Perspektik Hukum Internasional**

Hak asasi manusia merupakan suatu hak dasar bagi seluruh umat manusia, hak tersebut lahir ketika manusia tersebut terbentuk dan lahir. Hak asasi manusia untuk pertama kali menjadi suatu perhatian utama bagi dunia karena adanya berbagai pergolakan dan didasari adanya konflik di berbagai belahan dunia pada jaman sebelum masehi hingga saat ini, konflik masih berlangsung eksistensinya. Hak asasi manusia menjadi sebuah bahasa di dalam politik, hubungan internasional dan hukum di seluruh dunia.<sup>23</sup> Hak asasi manusia juga diharapkan tidak hanya berlaku bagi konflik-konflik dunia, tetapi juga dapat menjadi suatu norma umum dalam kasus pengadilan internasional maupun nasional yang dapat melindungi hak asasi manusia.<sup>24</sup> Norma hak asasi manusia melindungi tidak hanya bagi kepentingan

---

<sup>23</sup> H. Victor Conde, *A Handbook Of International Human Rights Terminology, Second Edition*, United States of America, University of Nebraska Press, 2004, page X

<sup>24</sup> Forsythe, David P, *Human Rights in International Relations Third Edition*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2012, page 15.

individu oleh sebuah negara, tetapi juga melindungi kepentingan umat manusia dan kepentingan yang dilindungi tidak pada penyelesaian negara.<sup>25</sup> Dalam hal perlindungan terhadap *internally displaced person*, hak asasi manusia memegang suatu peranan yang sangat penting.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* disebutkan pada Art 1 bahwa setiap manusia adalah dilahirkan secara bebas dan sesama pada harkat dan martabatnya. Dalam hal ini bahwa seluruh manusia mempunyai suatu kesamaan nilai harkat dan martabat, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pengungsi domestik, maka para pengungsi tersebut juga layak untuk mendapatkan hak yang sama sebagai seorang individu. Selanjutnya bahwa disebutkan “ *everyone has the right to life, liberty, and security of person* ”.<sup>26</sup> Berkaitan dengan perlindungan keamanan dan kebebasan, maka sesuai pula dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku juga dalam melakukan perlindungan hukum terhadap para pengungsi dengan status *internally displaced person*, prinsip tersebut adalah prinsip *liberty* dan prinsip *security*.<sup>27</sup>

Dalam ICCPR juga diketahui adanya hak untuk melawan suatu tindakan sewenang-wenang dalam merampas hak asasi manusia, seperti contoh bahwa adanya indikasi untuk pemberian kompensasi pada suatu waktu tertentu dapat diterima sebagai suatu hal alternatif untuk kembali.<sup>28</sup> Hal tersebut sebagai suatu ancaman bagi para *internally displaced person* untuk memaksa mereka untuk kembali. Hendaknya hak kompensasi tersebut harus diterima sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam ICCPR, dan dalam hal untuk kembali ke tempat sebelumnya merupakan suatu hak bagi mereka untuk memilih. Pada ICCPR juga disebutkan secara khusus bahwa “ *No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or*

---

<sup>25</sup>Barile, The Protection of Human Rights in Article 60, paragraph 5 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, International Law at the Time of its Codification, Essays in Honour of Roberto Ago, vol.II (1987), 3-4 dalam Alexander Orakhelashvili, *Peremptory Norms in International Law*, New York, Oxford University Press Inc, 2006, page 53.

<sup>26</sup>Universal Declaration of Human Rights, *opcit*, art 3

<sup>27</sup>Universal Declaration of Human Rights 1948

<sup>28</sup>Christine Bell, *ibid*, page 236

*punishment.*”<sup>29</sup> Dalam pasal tersebut juga berlaku bagi para *internally displaced person*, dimana perlindungan tersebut harus diterapkan bagi siapa saja di dalam keadaan apapun. Penghormatan yang efektif, perlindungan, dan tercapainya semua hak di dalam konvensi ini adalah penting dan merupakan suatu pengembangan komponen yang lebih jauh dibawah hak asasi manusia internasional.<sup>30</sup>

Perlindungan umum *internally displaced person* sebagai seorang *civilian* atau penduduk sipil terdapat didalam Konvensi Jenewa IV 1961 bagian II, dimana di dalam konvensi tersebut pada pasal 27 hingga 34 disebutkan beberapa hal yang tidak diijinkan untuk dilakukan terhadap mereka, yaitu:<sup>31</sup>

1. melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani,
2. melakukan intimidasi, terorisme, dan perampokan,
3. menjadikan mereka sebagai sandera,
4. melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani.

Sebab terjadinya perpindahan seseorang menuju wilayah lainnya, yang kemudian menimbulkan adanya pengungsi dengan status *internally displaced* dengan pengungsi dengan status *refugee* adalah memiliki kesamaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pengungsi internal juga dapat mendapatkan perlindungan berdasarkan *Convention Relating the Status of Refugee* 1951, sebagai bagian dari bentuk perlindungan internasional karena pengungsi domestik juga meninggalkan tempat asalnya menuju ke suatu wilayah lainnya tetapi tanpa melewati batas negara tetapi juga menjadi suatu *issue* internasional. Unsur penting yang memenuhi suatu pengungsi domestik dapat menerima perlindungan yang sama dengan pengungsi status *refugee* adalah bahwa pengungsi domestik mengalami yang dinamakan dengan *well-founded fear*, yaitu ketakutan yang mendasar. Yang akhirnya pula menyebabkan seseorang tersebut tidak ingin kembali ke wilayah atau tempat tinggalnya sebelumnya. Seseorang dibawah “presekusi” dalam pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 diartikan sebagai ancaman terhadap hidup, atau kebebasan mengenai

---

<sup>29</sup> Art 7 International Covenant on Civil and Political Rights.

<sup>30</sup> Ssenyonjo, Manisuli, *opcit.*

<sup>31</sup> Arlina Permanasari, *opcit.*, hal 171.

rasial, suku, agama, kebangsaan , pendapat politik, ataupun keanggotaan pada suatu kelompok tertentu ataupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>32</sup> Maka para pengungsi domestik juga dapat mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai pengungsi lainnya, dengan memberikan keamanan bagi mereka sesuai dengan perlindungan umum yang telah diatur. Pendekatan hukum “ *refugee*” mengambil kebutuhan kemanusiaan bagi perlindungan *refugee* merupakan suatu referensi yang relevan bagi kebutuhan serupa yang dibutuhkan oleh *internally displaced person*.<sup>33</sup>

Selanjutnya secara spesifik dan khusus, para *internally displaced person* juga hendaknya mendapatkan perlindungan dibawah atau menurut *United Nations Guiding Principles on Internal Displacement*. UNHCR mendefinisikan “perlindungan” sebagai kedua bentuk dari penjaminan dan perlindungan terhadap hak individu dan keamanan jasmani oleh pemerintah nasional dan institusi negara.<sup>34</sup> *Guiding principles* tersebut merupakan sebuah bentuk aturan dasar tentang bagaimana seharusnya negara yang bersangkutan dengan terjadinya konflik bersenjata yang menyebabkan bertubuhnya *internal displacement*, dapat menerapkan dan memberikan perlindungan yang seharusnya terhadap mereka. *Guiding principles* merupakan suatu tata cara yang menyediakan suatu format dalam jaminan hak secara *legal* untuk dapat dinikmati oleh para *internally displaced person*, seperti pada apa yang telah ditetapkan oleh aturan secara internasional dalam melindungi hak tersebut.<sup>35</sup> Terdapat beberapa prinsip-prinsip di dalam *Guiding Principles on Internal Displacement*, prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Prinsip tanggungjawab negara
2. Prinsip non-diskriminasi, dan
3. Prinsip hak dasar.

---

<sup>32</sup> UNHCR, *Handbook of Procedures and Criteria for Determining Refugee Status Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, HCR/IP/4/Eng/REV.1, 1992, para 51.

<sup>33</sup> Rhodri C. Williams, *Protecting Internally Displaced Persons: A Manual for Law and Policymaker*, Washington DC, Brooking Institution- University of Bern, 2008, page 3

<sup>34</sup> UNHCR, *Introduction to International Protection: UNHCR Emergency Management Training Program* (Background paper, 1 July 1999) 1 dalam Jane McAdam, *ibid*, page 8.

<sup>35</sup> David Fisher, *Guide to International Human Rights Mechanism for Internally Displaced Persons and their Advocates*, The Brooking Institution- University of Bern Project on Internal Displacement, 2006, page V

Berdasarkan internasional perspektif, tanggungjawab utama untuk melindungi dan membantu internally displaced person akan bersinggungan dengan wilayah negara, dalam hal ini berkaitan dengan kedaulatan dan prinsip *non-intervention*.<sup>36</sup> Berdasarkan internasional perspektif, tanggungjawab utama untuk melindungi dan membantu internally displaced person akan bersinggungan dengan wilayah negara, dalam hal ini berkaitan dengan kedaulatan dan prinsip *non-intervention*.<sup>37</sup> Dalam kenyataannya, *internal displacement* seringkali timbul sebagai bagian dari konflik sipil, di dalam suatu situasi dimana kekuasaan dari pemerintah pusat mengalami suatu konflik, dan dengan kapasitasnya atau keinginannya untuk menyediakan perlindungan dan bantuan dengan seimbang diragukan.<sup>38</sup> Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka tanggungjawab negara terhadap *internally displaced person* berada pada kewajiban negara itu sendiri. Prinsip tanggungjawab negara dalam *Guiding Principles* ini mengatakan bahwa:

“ *Sovereignty entails not only the right of each state to conduct its own affairs but also the primary duty and responsibility to provide protection and assistance without discrimination to its population, including the internally displaced, in accordance with international human rights and humanitarian.* ”<sup>39</sup>

Dalam apa yang disebutkan diatas, merupakan suatu ungkapan bahwa sebuah negara tidak hanya mempunyai kedaulatan dan hak dalam terlibat terkait hal tentang perlindungan *internally displaced person* yang timbul di negaranya, tetapi juga suatu negara yang bersangkutan tersebut juga harus mempunyai suatu kewajiban atau tanggungjawab dalam memberikan suatu perlindungan, tanpa adanya diskriminasi

---

<sup>36</sup> Guy S Goodwin-Gill, Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, New York, Oxford University Press Inc, 2007, page 481

<sup>37</sup> Guy S Goodwin-Gill, Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, New York, Oxford University Press Inc, 2007, hal 481

<sup>38</sup> Guy S. Goodwin-Gill, *ibid*.

<sup>39</sup> Guiding Principle 3.1



terkait dengan hak asasi manusia internasional dan hak humaniter.

Dalam kenyataannya, internal displacement seringkali timbul sebagai bagian dari konflik sipil, di dalam suatu situasi dimana kekuasaan dari pemerintah pusat mengalami suatu konflik, dan dengan kapasitasnya atau keinginannya untuk menyediakan perlindungan dan bantuan dengan seimbang diragukan.<sup>40</sup> Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka tanggungjawab negara terhadap internally displaced person berada pada kewajiban negara itu sendiri. dalam *Guiding Principles on Internal Displacement*, terdapat prinsip hak dimana perlindungan keamanan dan perlindungan hak asasi manusia tidak dapat diberikan secara diskriminasi, melainkan setiap pengungsi dengan status internal displacement berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan perlindungan secara umum yang telah diatur.

Prinsip hak dasar diberikan kepada para internally displaced person di Nigeria berdasarkan *Guiding Principles on Internal Displacement*, yang terdapat pada *principles* ke 14 dan *principles* ke 15. Dalam hak-hak dasar tersebut disebutkan hak-hak yang patut untuk diperoleh bagi para *internally displaced* sebagai suatu perlindungan baginya. Dalam prinsip ke 14 disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kemerdekaannya sendiri dan hak untuk memilih sendiri tempat tinggalnya. Selanjutnya dalam prinsip ke 15 disebutkan pula demikian bahwa:<sup>41</sup>

- (a) Hak untuk mencari keselamatan di wilayah lain negara mereka yang sebelumnya;
- (b) Hak untuk meninggalkan negara mereka yang sebelumnya tempat mereka tinggal;
- (c) Hak untuk mencari suaka di negara lainnya; dan
- (d) Hak untuk memperoleh perlindungan dari pemulangan atau pengembalian atau pemukiman kembali secara paksa ke tempat di mana nyawa, keselamatan, kemerdekaan, dan/atau kesehatan serta perlindungan mereka akan terancam.

---

<sup>40</sup> Guy s. Goodwin-Gill, *ibid*.

<sup>41</sup> *Guiding Principles, opcit*, 15

Nigeria sebagai bagian dari *African Union* merupakan salah satu negara yang menerima atau meartifikasi tentang suatu produk hukum yang dihasilkan untuk melindungi para *internally displaced person* di Afrika secara khusus. Produk hukum yang menyediakan perlindungan secara khusus tersebut merupakan suatu konvensi bersama negara-negara di Afrika yang tergabung di dalam African Union. Konvensi tersebut adalah Konvensi Kampala atau *Kampala Convention (African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa)* 2009. Dalam Kampala Convention 2009 konsep yang diatur didalamnya adalah berupa suatu tanggungjawab nasional atau *national responsibility*. Hal utama dalam konvensi ini, yaitu suatu pemaksaan secara jelas pada suatu hal yaitu penegasan adanya *state's responsibility* untuk mengormati dan melindungi *internally displaced person* dan memenuhi hak yang telah dicantumkan.<sup>42</sup> *Kampala Convention* merupakan suatu intrumen hukum khusus bagi negara-negara di Afrika yang telah meratifiksainya dalam menekankan akan perlunya perlindungan hukum bagi *internally displacement person*, di setiap negara-negara bagian dengan krisis semakin bertambahnya jumlah IDP tersebut. Terdapat pada pasal 7 ayat 5, dinyatakan bahwa setiap pihak dalam konflik bersenjata dilarang untuk melakukan suatu penyerangan kepada penduduk sipil dan setiap hal-hal yang dilindungi berdasarkan sifat kemanusiaannya. Maka negara Nigeria sebagai pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut, hendaknya dapat menghindarkan para penduduk sipil yaitu setiap *internally displaced person* terhadap serangan pihak lain.

## **V. KESIMPULAN dan SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Urgensi perlindungan hukum bagi *Internally Displaced Person* (IDP) pada konflik bersenjata di Nigeria merupakan urgensi dalam hal:

---

<sup>42</sup>The Internal Displacement Monitoring Centre, Norwegian Refugee Council, *The Kampala Convention One year on: Progress and prospect*, Switzerland, 2013, page 14

- a. perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata menurut *Geneva Convention* 1949 dan menurut *humanity principles*
  - b. perlindungan hak asasi manusia menurut *Universal Declaration of Human Rights* 1948
  - c. fakta-fakta berurutan banyaknya korban penduduk sipil dan meluasnya wilayah konflik.
2. Perpindahan *Internally Displaced Person* (IDP) yang dikarenakan konflik bersenjata mempunyai perlindungan hukum yang berlaku menurut hukum internasional, yaitu perlindungan melalui :
- a. *Universal Declaration of Human Rights* 1948 sebagai suatu prinsip dasar umum.
  - b. *Geneva Convention* 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil pada saat terjadinya konflik bersenjata.
  - c. *Internally Displaced Person* (IDP) atau pengungsi domestik juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum internasional tentang *refugee* yaitu Konvensi Mengenai Status Pengungsi 195.
  - d. Perlindungan berdasarkan *Guiding Principles on Internal Displacement* 1998, yang mengatur mengenai prinsip-prinsip perlindungan terhadap nyawa dan keamanan terhadap *internal displacement* selama masa perpindahan maupun dalam hal untuk mencegah suatu perpindahan.
  - e. Perlindungan menurut *Kampala Convention* 2009, mencantumkan hal yang mempunyai kesamaan di dalam *guiding principles* dalam memberikan perlindungan terhadap para *internal displacement*.

## B. Saran

Dalam kasus konflik bersenjata oleh Boko Haram di Nigeria yang masih berlangsung hingga saat ini, dimana kasus tersebut menimbulkan jumlah internal

displacement yang sangat banyak jumlahnya, hendaknya negara Nigeria melakukan kewajibannya sebagai sebuah negara yang bertanggungjawab terhadap adanya perpindahan domestik besar-besaran tersebut. Pertanggungjawaban tersebut tentunya dengan memberikan perlindungan hukum sesuai dengan hukum Internasional yang berlaku, yang dapat menjadin hak-hak pengungsi domestik serta dapat menjamin perlindungan jiwa dan perlindungan keamanan terhadap mereka, mengingat urgensi dari perlindungan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

Aust, Anthony. Handbook of International Law. Cambridge University, London, 2005

Bell, Christine, Peace Agreements and Human Rights, United States, New York, Oxford University Press. Inc, 2000

Conde, H.Victor A Handbook Of International Human Rights Terminology, Second Edition, United States of America, University of Nebraska Press, 2004

Crawford, James, State Responsibility The General Part: Cambridge Studies in International and Comparative Law, Cambridge University Press, New York, 2013

European Court of Human Rights- Council of Europe, Handbook on European non- discrimination law, Luxembourg, Imprimerie Centrale, 2010

Eve La Yahe, War Crimes in Internal Armed Conflict, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008

Fisher, David Guide to International Human Rights Mechanism for Internally Displaced Persons and their Advocates, The Brooking Institution- University of Bern Project on Internal Displacement, 2006

Forsythe, David P, Human Rights in International Relations Third Edition, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2012

Garner, Bryan A, Black's Law Dictionary Ninth Edition, USA: Thomson Reuters, 2009

Goodwin-Gill, Guy S, Jane McAdam, The Refugee in International Law, New York, Oxford University Press Inc, 2007

Joseph, Sarah, Adam McBeth, Research Handbook on International Human Rights Law, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, USA. 2010

Koesparmono, Irsan, Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007

Malanczuk, Peter, Modern Introduction to International Law, Routledge, New York, 1997

Mauna, Boer, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam EraDinamika Global, Alumni, Bandung, 2005

Mertokusumo, Sudikno ,Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1996

Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1997

N. Pidgeon , M. O' Leary, Man-made disaster : why technology and organizations (sometimes) fail, Safety Scince, 2000

Normand, Roger, Sarah Zaidi, Human Rights at The UN, The Political History of Universal Justice, Bloomington, Indiana University Press, 2008

Permanasari, Arlina, Aji Wibowo, dkk, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta, International Committed of the Red Cross, 1999

Phuong, C., The International Protection of Internally Displaced Persons, Cambridge University Press, Cambridge, 2004

Pranoto, Iskandar,Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual, MP Press, Cianjur, 2010

Protecting Internally Displaced Person: A Manual for Law and Poliymakers, BrookingInstitution, University of Bern,2008

Richard Skolnik,Essentials of Global Health, Jones and Bartlett Publisher International, London UK, 2008

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006

Said Adejumobi, Adebayo Olukoshi (Ed.), The African Union and New Strategies for Development in Africa, Cambria Press, Amherst, 2008

Shaw, Malcolm N., International Law, Cambridge University Press, New York, USA,2008.

Ssenyonjo, Manusuli, Economic, Social and Cultural Rights in International Law, Hart Publishing, Portland, USA, 2009

Starke, J.G, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Sasoli, Marco, Legitimate Targets of Attacks Under International Humanitarian Law, Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard university, 2003.

Thontowi, Jawahir, Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung, PT Refika Aditama, 2006

Tiefenbacher, John (Ed), Approches to Managing Disaster – Assesing Hazards, Emergencies and Disaster Impact, Croatia, InTech Europe, 2012

Tunkin, G. Theory of International Law, London, 1974

UNHCR, Handbook of Procedures and Criteria for Determining Refugee Status Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, HCR/IP/4/Eng/REV.1, 1992

Verri, Pietro, Dictionary of the International Armed Conflict, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1992

Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Williams, Rhodri C, Protecting Internally Displaced Persons: A Manual for Law and Policymaker, Washington DC, Brooking Institution- University of Bern, 2008

### **Perjanjian Internasional**

Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal 1948

Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951

African Union Convention for The Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention) 2009

United Nations Guiding Principles on Internal Displacement 1998

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR).

The International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR).

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945  
Geneva Convention 1949

### **Jurnal**

Barile, The Protection of Human Rights in Article 60, paragraph 5 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, International Law at the Time of its Codification, Essays in Honour of Roberto Ago, vol.II (1987), 3-4 dalam Alexander Orakhelashvili, Peremptory Norms in International Law, New York, Oxford University Press Inc, 2006

Brun, Cathrine (NTNU Research Group on Force Migration), Research guide on internal displacement, Norway, Department of Geography, Norwegian University of Science and Thecnology (NTNU)

Carnahan, Burus M Lincoln, Lieber and the laws of war: the origins and limits of the principle of military necessity, The American Journal of International Law, Vol.92, American Society of International Law, 1998

Development Team Department of Ocean Development Integrated Coastal and Marine Area Management Project Directorate Chennai, Preliminary Assesment of Impact of Tsunami in Selected Coastal Areas of India (a), 2005

FM 3-24, MCWP 3-33.5, Insurgencies and Countering Insurgencies, Washington DC, Headquarters Department of The Army, 2014

Haryomataram, Sekelumit Tentang Hukum Humaniter , UNS Press, 1994

Irawati Handayani, 2002, Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik (Internally Displaced Persons) Dalam Sengketa Bersenjata Internal Menurut Hukum Internasional, Bandung :Jurnal HI UNPAD , vol. 1 no.2

Kristen E Boon, New Directions in Responsibility: Assesing The International Law Commision's Draft Article on the Responsibility of International Organization, The Yale Journal of International Law Online, Vol 37

PROTECTION OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS, New York, Inter-Agency Standing Committee Policy Paper, 1999

S. Martin, Managing Environmentally-Induced Migration", in F. Laczko and C. Aghazarm (eds.), Migration, Environment and Climate Change 353, 2009, note 6 dalam Roberta Cohen, Megan Bradley, Disasters and Displacement : Gaps in Protection, Journal of International Humanitarian Legal Studies, Vol. 1, 2010



The Climate Change – Displacement Nexus’, presented by Prof. Walter Kälin, Representative of the Secretary-General on the Human Rights of Internally Displaced Persons, Panel on disaster risk reduction and preparedness: addressing the humanitarian consequences of natural disasters, ECOSOC Humanitarian Affairs Segment, 16 July 2008

Walter Kalin, Guiding Principles on Internal Displacement Annotations, Studies in Transnational Legal Policy, The American Society of International Law, 2000

Yasuyuki, Sawada, Rima Bhattacharyay, Kotera Tomoaki, Aggregate Impact of Natural and Man-made Disasters: A quantitative comparison, RIETI Discussion Paper Series E- 023, The Research Institute of Economy, Trade and Industries, 2011

### **Data**

UNHCR Global Overview 2011, People internally displaced by conflict and violent.

UNHCR Global Appeal 2015 Update.

The Internal Displacement Monitoring Centre, Norwegian Refugee Council, The Kampala Convention One year on: Progress and prospect, Switzerland, 2013

Lennard, Jeremy (Ed), Global Overview 2014 People internally displaced by conflict and violence, Geneva, Internal Displacement Monitoring Centre, Norwegian Refugee Council

### **Internet**

#### **BBC**

[http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/01/120122\\_nigeriablast.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/01/120122_nigeriablast.shtml), 2012, diakses pada tanggal 17 Januari 2015

Beyani, Chaloka, Rita Izsak, <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14896&LangID=E>, diakses pada 29 September 2014

Nigeria: UN envoy condemns renewal of heinous Boko Haram attacks on civilians, <http://unic-jakarta.org/2014/07/25/nigeria-utusan-pbb-kutuk-serangan-keji-terbaru-boko-haram-terhadap-warga-sipil/>, diakses pada 29 September 2014

Ratna, Heppy, <http://www.antaranews.com/berita/460935/30-remaja-diculik-di-bagian-utara-nigeria>, 2014 diakses pada tanggal 17 Januari 2015

Smith-Spark, Laura, Nic Robertson,  
<http://edition.cnn.com/2015/01/15/africa/nigeria-boko-haram-images/index.html?eref=edition>, 2015, diakses pada tanggal 17 Januari 2015

UNHCR, <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c146.html>, diakses pada 6 Oktober 2014

VOA, <http://www.voaindonesia.com/content/boko-haramrebut-kota-chibok-kampung-halaman-200-perempuan-yang-diculik/2521230.html>, 2014, diakses pada tanggal 17 Januari 2015